



RENCANA STRATEGIS
KAPANEWON PLAYEN
TAHUN 2025-2029

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PLAYEN
TAHUN 2025

LAMPIRAN XXXVI
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dasar penyusunan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ini ditetapkan.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dengan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan. Adapun tahapan penyusunan Renstra antara lain: Persiapan penyusunan, Penyusunan rancangan awal, Penyusunan rancangan, Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, Perumusan rancangan akhir dan Penetapan Renstra PD.

Pada tahapan persiapan penyusunan, diperlukan pembentukan tim penyusun Renstra PD yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah sekurang-kurangnya ketua tim (panewu), sekretaris tim (panewu anom) dan kelompok kerja (semua struktural kapanewon Playen). Tim ini bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.

Penyusunan dokumen renstra diawali dengan penyusunan rancangan awal renstra PD dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD. Proses ini dimulai sejak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dilantik. Adapun cakupan penyusunan rancangan awal Renstra PD terdiri dari :

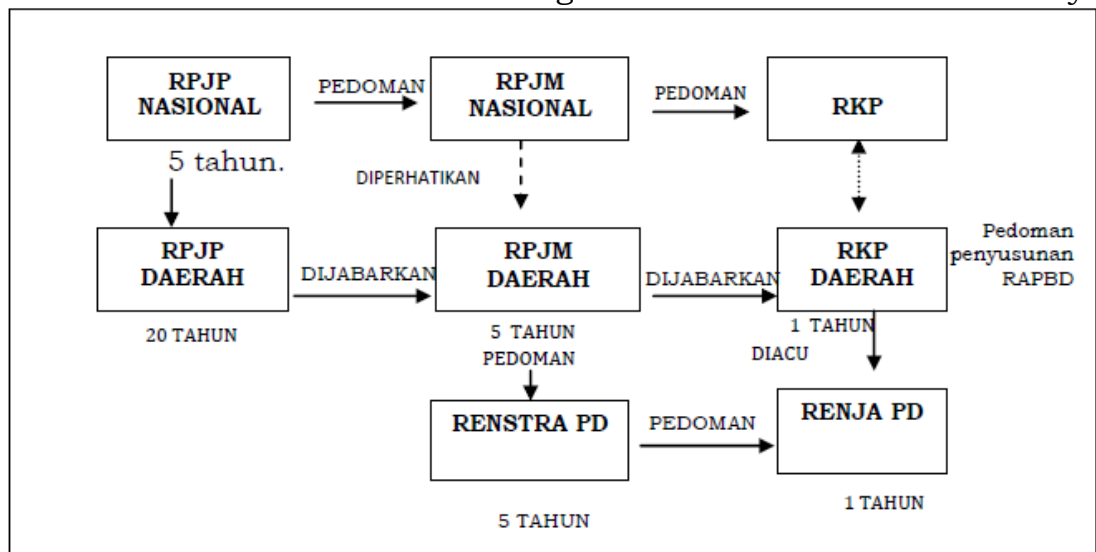
- a. Analisis gambaran pelayanan
- b. Analisis permasalahan
- c. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya
- d. Analisis isu strategis
- e. Perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD
- f. Perumusan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja PD
- g. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan arah kebijakan PD serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD

Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Perumusan sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah dirumuskan dalam penyusunan RKPD berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, program pembangunan Daerah, serta perkembangan permasalahan pembangunan Daerah lainnya. Sasaran Renstra Perangkat Daerah merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Perangkat Daerah.

Kapanewon Playen sebagai salah satu Perangkat Daerah yang diberi tugas oleh Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengkoordinasikan lembaga/perangkat daerah lainnya dalam wilayah kerja. Rencana Strategis ini dibuat sebagai petunjuk dan penentu arah, sasaran, tujuan, serta cara bagaimana mandat yang telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi Kapanewon dapat dilaksanakan dengan baik, dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Gunungkidul. Keterkaitan antara Renstra Kapanewon Playen dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya adalah bahwa Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten untuk setiap Perangkat Daerah untuk jangka waktu lima tahunan dan disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dikoordinir oleh Bappeda. Renstra Perangkat Daerah ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk kurun waktu satu Tahun. Keterkaitan tersebut seperti tergambar di bawah ini :

Gambar 1.1

Keterkaitan Dokumen Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
- d. Undang-undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- m. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- n. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,

- Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
 - p. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 3);
 - q. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
 - r. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6);
 - s. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 116);
 - t. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon;
 - u. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 41 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
 - v. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2025 Tanggal 19 Maret 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Strategis Kapanewon Playen adalah :

1. Maksud :

- a. Sebagai acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pembangunan Kapanewon.
- b. Memberikan arah dan pedoman bagi semua pegawai Kapanewon Playen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat tercapai.
- c. Sebagai gambaran pembangunan Kapanewon dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.
- d. Rencana Strategis merupakan titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah, sehingga penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan sebagai implementasi dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, serta merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Kapanewon sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

2. Tujuan :

- a. Sebagai gambaran tentang kondisi umum Kapanewon Playen saat ini dan kondisi yang akan dicapai 5 tahun kedepan.
- b. Sebagai acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka pembangunan kapanewon waktu 5 tahun kedepan.
- c. Sebagai pedoman bagi aparat Kapanewon Playen dalam bekerja dan menilai arah, kebijakan, program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.
- d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Kapanewon Playen.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Kapanewon Playen disusun dengan Sistematika penulisan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KAPANEWON PLAYEN

- 2.1 Gambaran Pelayanan Kapanewon Playen
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kapanewon Playen
 - 2.1.2 Sumber Daya Kapanewon Playen
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Kapanewon Playen
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Kapanewon Playen
 - 2.1.5 Mitra Kapanewon Playen dalam pemberian pelayanan
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kapanewon Playen
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kapanewon Playen
 - 2.2.2 Isu Strategis

- BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Playen
 - 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kapanewon Playen dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD tahun 2025-2029
- BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- 4.1 Program Kapanewon Playen
 - 4.2 Kegiatan Kapanewon Playen
 - 4.3 Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif
 - 4.4 Subkegiatan dalam rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
 - 4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama (IKU)
 - 4.6 Target Keberhasilan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)
- BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KAPANEWON PLAYEN

2.1 Gambaran Pelayanan Kapanewon Playen

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kapanewon Playen

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja Kapanewon, Kapanewon Playen merupakan perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kalurahan. Kapanewon dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kapanewon terdiri dari:

- a. Unsur pimpinan : Panewu
- b. Unsur pembantu pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari subbagian-subbagian
- c. Unsur pelaksana : Jawatan – jawatan
- d. Kelompok jabatan fungsional

Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Playen dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi antara lain:

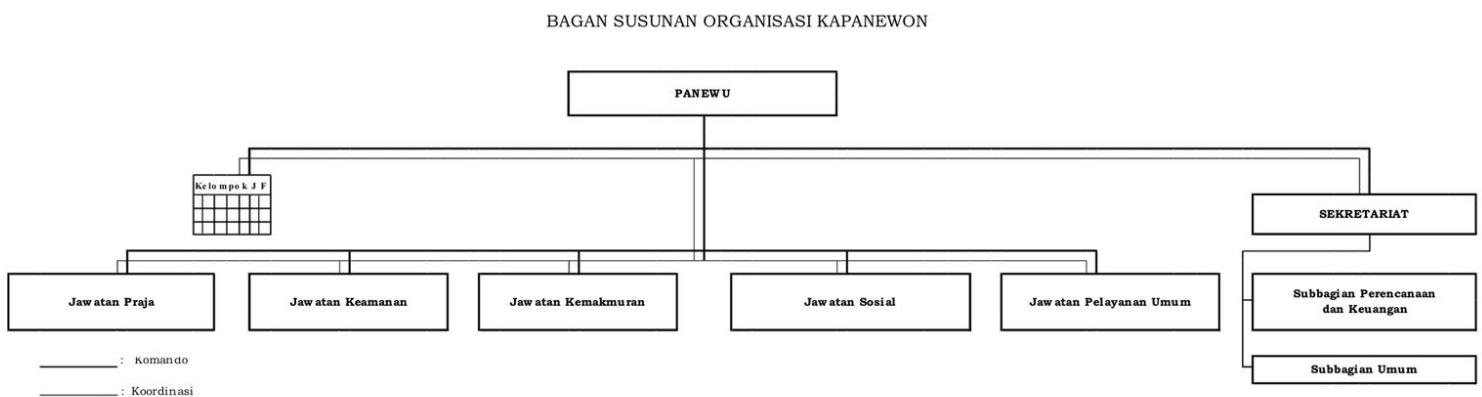
- a. Perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- c. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan sarana pelayanan umum;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di wilayah Kapanewon;
- i. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa yang juga dimaknai sebagai kalurahan;
- j. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon;
- k. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang Kapanewon;

- l. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- m. Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon
- n. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan; dan
- o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.

Adapun struktur organisasi kapanewon terdiri dari:

- a. Panewu
- b. Sekretriati yang membawahi:
 1. Subbagian perencanaan dan keuangan
 2. Subbagian umum
- c. Jawatan Praja
- d. Jawatan Keamanan
- e. Jawatan Kemakmuran
- f. Jawatan Sosial
- g. Jawatan Pelayanan Umum
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan struktur organisasi kapanewon playen sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon sebagai berikut:



Sumber: Permendagri Nomor 86 tahun 2017

2.1.2 Sumber Daya Kapanewon Playen

1. Sumber Daya Manusia

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi kapanewon, didukung sumberdaya manusia dengan jumlah pegawai sebanyak 19 orang pada akhir tahun 2024 yang terdiri dari 14 PNS, 1 PPPK dan 4 Tenaga Harian Lepas (THL). Adapun jabatan struktural di lingkungan Kapanewon Playen sebanyak 9 jabatan, terdiri dari eselon III.a = 1 jabatan, eselon III.b = 1 jabatan (definitif), eselon IV.a = 5 jabatan, dan eselon IV.b = 2 jabatan. Sedangkan jumlah Pegawai non eselon sebanyak 11 orang. Dukungan sumber daya manusia pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi				Pegawai yang ada					Jenis Kelamin			
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki	Peremp	
1	2	3	4				5	6				7	8	
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SM A	SMP		
1	Unsur Pimpinan													
	Panewu	1		1			1		1				1	
2	Unsur Pembantu Pimpinan													
	Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian	22		9	1	12	8		5	1	2		6	2
3	Unsur Pelaksana													
	Jawatan-jawatan;	28		11		17	10	2	7		1		7	3
4	Kelompok Jabatan Fungsional													
	Jumlah	51		21	1	29	19	2	13	1	3		14	5

Sumber: Data Kepegawaian Kapanewon Playen per 31 Desember 2024

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul relatif tinggi, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 13 orang (68,42%), disusul oleh jenjang pendidikan SLTA sebanyak 3 orang (15,79%), S2 sebanyak 2 orang (10,53%) dan D3 sebanyak 1 orang (5,26%). Komposisi pegawai laki-laki lebih banyak dibanding pegawai perempuan. Namun, keberadaan pegawai perempuan, bahkan 1 orang diantaranya menduduki jabatan struktural, menunjukkan penerapan sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

2. Sumber Daya Asset/Modal

Kapanewon Playen terus berupaya melaksanakan upaya penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana, peralatan dan perlengkapan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja. Dukungan sarana-prasarana Perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi aula, ruang arsip, dan mushola.

Fasilitas penunjang juga disediakan untuk dapat memberikan layanan tempat, keamanan, serta kenyamanan kepada masyarakat, dengan akses yang mudah dan perlakuan yang sama, tidak diskriminatif, dan ada perlakuan khusus bagi kelompok

berkebutuhan khusus sebagaimana yang diatur dalam SE Menteri PANRB nomor 66 Tahun 2020 tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Bagi Kelompok Rentan dalam Penyelenggaraan Publik. Akan tetapi sampai saat ini Kapanewon Playen belum memiliki fasilitas ruang laktasi untuk ibu menyusui.

Adapun fasilitas yang sudah dimiliki Kapanewon Playen antara lain:

- a. Bangunan ramah disabilitas
Kantor Kapanewon Playen telah dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas dengan:
 - pintu masuk yang mudah diakses
 - toilet terpisah untuk laki-laki, perempuan dan 1 toilet disabilitas
 - Ruang tunggu dengan tempat duduk prioritas bagi pengguna layanan kelompok rentan
- b. Halaman luas yang dapat digunakan sebagai arena bermain anak maupun untuk parkir khusus yang mudah diakses
- c. Sarana dan prasarana konsultasi dan pengaduan
- d. Penyediaan fasilitas sanitasi sebagai upaya menjaga kebersihan dan kesehatan.

Tabel 2.2 Sarana - Prasarana

No	Klasifikasi	Nilai Aset (Rp)*
	ASET TETAP	2.556.331.088,61
1	TANAH	75.750.000,00
	a. Tanah	75.750.000,00
2	PERALATAN DAN MESIN	917.271.667,28
	a. Alat Angkutan	295.422.200,00
	b. Alat Kantor Dan Rumah Tangga	360.829.580,28
	c. Alat Kedokteran Dan Kesehatan	485.000,00
	d. Alat Laboratorium	784.000,00
	e. Komputer	259.750.887,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	3.166.978.129,00
	a. Bangunan Gedung	3.141.978.129,00
	b. Tugu Titik Kontrol/Pasti	25.000.000,00
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	100.508.500,00
	a. Bangunan Air	40.100.000,00
	b. Instalasi	52.836.000,00
	c. Jaringan	7.572.500,00
5	ASET TETAP LAINNYA	14.983.000,00
	a. Barang bercorak kesenian/kebudayaan/ olahraga	14.983.000,00

Sumber: Laporan Keuangan Kapanewon Playen Tahun 2024
*Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2024

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kapanewon Playen

Sebagai salah satu Perangkat daerah, Kapanewon Playen tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon.

Kapanewon Playen juga harus mendukung pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul. Dalam melaksanakan tugasnya Kapanewon Playen harus mampu menterjemahkan visi, misi, pembangunan daerah yang kemudian dijabarkan dalam rencana strategis kapanewon. Mendasar kepada rencana strategis yang telah ditetapkan dan didukung dengan sumberdaya yang ada, tugas-tugas yang dibebankan kepada Kapanewon Playen dapat dilaksanakan dengan baik.

Dalam perkembangannya tugas-tugas yang diemban Kapanewon Playen dapat dilaksanakan, namun demikian masih ada permasalahan-permasalahan yang muncul dan merupakan faktor hambatan untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai secara optimal. Permasalahan tersebut lebih disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah kondisi sumber daya yang dimiliki. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan faktor penting dalam pelaksanaan tugas-tugas masih kurang optimal.

Di sisi lain keberhasilan dalam pelaksanaan tugas disebabkan karena adanya sistem yang dibangun oleh Kapanewon Playen, diantaranya terciptanya koordinasi yang lintas sektoral (UPT, pemerintah kalurahan, dan Dinas Instansi), masih kentalnya jiwa gotong-royong, adanya pembagian tugas dan fungsi pada struktur organisasi, tersusunnya jadwal pelaksanaan tugas yang jelas, serta terbangunnya sikap dan perilaku petugas yang baik dalam pelaksanaan tugas-tugas layanan.

Untuk mengetahui persentase kinerja pelayanan Kapanewon Playen disajikan dan rincian anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan, rasio antara realisasi dan anggaran, serta rata-rata pertumbuhan Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul masing-masing disajikan data dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Playen
Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2022-2026

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Ket
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat				72,96	76,10	85,32	85,32	Na	84,90	85,32	85,70	Na	Na	116,37	112,12	100,45	Na	Na	
2	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja PD				80,01	80,02	80,03	80,83	Na	80,60	80,83	80,83	Na	Na	100,74	101,01	101,00	Na	Na	
3	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan				7	7	7	7	Na	7	7	7	Na	Na	100,00	100,00	100,00	Na	Na	

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Playen
Kabupaten Gunungkidul

No	Uraian	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke					Rata -Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	132.750.000	100.000.000	100.000.000	60.000.000	-	132.750.000	99.999.950	100.000.000	0	0	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	(33.187.500)	-25
2.22.08.2.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	132.750.000	100.000.000	100.000.000	60.000.000	-	132.750.000	99.999.950	100.000.000	0	0	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	(33.187.500)	-25
2.22.08.2.09.07	Gelar Budaya Jogja	132.750.000	100.000.000	100.000.000	60.000.000		132.750.000	99.999.950	100.000.000			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	(33.187.500)	-25
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	25.970.000	35.000.000	117.545.000	40.000.000	0	25.970.000	34.598.109	117.545.000	0	0	100,00	98,85	100,00	0,00	0,00	(6.492.500)	-25
4.01.04.2.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	25.970.000	0	0	40.000.000	0	25.970.000	0	0	0	0	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	(6.492.500)	#DIV/0!
4.01.04.2.01.07	Penerapan dan pendampingan keistimewaan di kapanewon/kemantren dan kalurahan/kelurahan				40.000.000							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	-	#DIV/0!
4.01.04.2.01.10	Pelaksanaan Kelembagaan Asli	25.970.000					25.970.000					100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	(6.492.500)	#DIV/0!
4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan		35.000.000	117.545.000	0	0		34.598.109	117.545.000	0	0	#DIV/0!	98,85	100,00	#DIV/0!	0,00	-	#DIV/0!
4.01.04.5.06.01	Penyusun Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan		35.000.000	117.545.000				34.598.109	117.545.000	-	0	#DIV/0!	98,85	100,00	#DIV/0!	0,00	-	#DIV/0!
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.120.510.915	1.399.939.874	1.323.521.945	1.445.378.920	-	2.095.114.917	1.382.770.784	1.314.560.816	0	0	98,80	98,77	99,32	0,00	0,00	(530.127.729)	-24,700591

7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.327.500	38.937.500	37.316.500	48.440.000	-	30.235.000	38.937.488	37.316.500	0	0	99,69	100,00	100,00	0,00	0,00	(7.581.875)	-24,923749
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.407.500	28.682.500	31.632.500	36.505.000		25.315.000	28.682.500	31.632.500	-0		99,64	100,00	100,00	0,00	0,00	(6.351.875)	-24,908984
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	690.000	1.080.000	970.000	1.370.000		690.000	1.080.000	970.000	-		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	(172.500)	-25
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	510.000	950.000	820.000	1.170.000		510.000	950.000	820.000			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	(127.500)	-25
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	760.000	1.380.000	790.000	1.610.000		760.000	1.380.000	790.000			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	(190.000)	-25
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	740.000	1.110.000	710.000	1.600.000		740.000	1.110.000	710.000			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	(185.000)	-25
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3.055.000	1.844.000	3.345.000			3.054.988	1.844.000			#DIV/0!	100,00	100,00	0,00	0,00	-	#DIV/0!
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.220.000	2.680.000	550.000	2.840.000		2.220.000	2.680.000	550.000			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	(555.000)	-25
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.706.793.415	1.039.314.914	1.069.428.890	1.123.522.360	-	1.689.274.257	1.024.084.327	1.063.662.354	0	0	98,97	98,53	99,46	0,00	0,00	(426.698.354)	-24,743391
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.703.773.415	1.035.313.014	1.063.148.890	1.117.032.360		1.686.254.257	1.020.082.427	1.057.382.354			98,97	98,53	99,46	0,00	0,00	(425.943.354)	-24,742936
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	880.000	1.480.000	1.060.000	1.780.000		880.000	1.480.000	1.060.000			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	(220.000)	-25
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.140.000	2.521.900	5.220.000	4.710.000		2.140.000	2.521.900	5.220.000			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	(535.000)	-25

7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	2.000.000	6.920.000	4.821.900	5.664.800	-	2.000.000	6.919.920	4.475.262	0	0	100,00	100,00	92,81	0,00	0,00	(500.000)	-25
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawain	2.000.000	6.920.000	4.821.900	5.664.800		2.000.000	6.919.920	4.475.262			100,00	100,00	92,81	0,00	0,00	(500.000)	-25
7.01.01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.635.000	68.141.400	37.403.900	43.244.500	-	60.633.880	68.063.520	36.753.900	0	0	100,00	99,89	98,26	0,00	0,00	(15.158.750)	-24,999538
7.01.01.2.05.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000	1.732.400	535.000	2.000.000		1.500.000	1.732.400	535.000			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	(375.000)	-25
7.01.01.2.05.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.945.000	51.609.000	31.167.000	30.053.000		46.945.000	51.609.000	30.517.000			100,00	100,00	97,91	0,00	0,00	(11.736.250)	-25
7.01.01.2.05.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.500.000	2.940.000	1.150.000	2.500.000		1.498.880	2.940.000	1.150.000			99,93	100,00	100,00	0,00	0,00	(375.000)	-24,981333
7.01.01.2.05.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000	4.960.000	1.781.900	1.791.500		5.000.000	4.960.000	1.781.900			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	(1.250.000)	-25
7.01.01.2.05.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.080.000	1.080.000	0	0		1.080.000	1.080.000	0			100,00	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	(270.000)	#DIV/0!
7.01.01.2.05.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	300.000	1.050.000	300.000	1.360.000		300.000	974.550	300.000			100,00	92,81	100,00	0,00	0,00	(75.000)	-25
7.01.01.2.05.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.310.000	4.770.000	2.470.000	5.540.000		4.310.000	4.767.570	2.470.000			100,00	99,95	100,00	0,00	0,00	(1.077.500)	-25
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	32.890.000	16.970.000	16.750.000	44.070.000	-	32.890.000	16.970.000	16.700.000	0	0	100,00	100,00	99,70	0,00	0,00	(8.222.500)	-25
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	4.890.000	7.470.000		20.570.000		4.890.000	7.470.000				100,00	100,00	#DIV/0!	0,00	0,00	(1.222.500)	#DIV/0!
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.000.000	9.500.000	16.750.000	23.500.000		18.000.000	9.500.000	16.700.000			100,00	100,00	99,70	0,00	0,00	(4.500.000)	-25
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	0		0		10.000.000					100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	(2.500.000)	#DIV/0!
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.297.500	107.586.060	117.790.755	116.037.260	-	68.514.280	107.104.600	115.642.800	0	0	89,80	99,55	98,18	0,00	0,00	(19.074.375)	-22,449713

7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.777.500	25.097.500	25.297.500	55.940.000		20.695.000	25.097.500	25.297.500			99,60	100,00	100,00	0,00	0,00	(5.194.375)	-24,900734
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.000.000	34.478.560	43.405.755	59.497.260		31.376.780	33.997.100	41.257.800			80,45	98,60	95,05	0,00	0,00	(9.750.000)	-20,113321
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.520.000	48.010.000	49.087.500	600.000		16.442.500	48.010.000	49.087.500			99,53	100,00	100,00	0,00	0,00	(4.130.000)	-24,882718
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75.077.500	122.070.000	40.010.000	64.400.000	-	75.077.500	120.690.929	40.010.000	0	0	100,00	98,87	100,00	0,00	0,00	(18.769.375)	-25
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.500.000	37.200.000	36.700.000	40.300.000		35.500.000	37.200.000	36.700.000			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	(8.875.000)	-25
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	2.500.000	0				2.500.000	0				100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	(625.000)	#DIV/0!
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.290.000	8.070.000	2.110.000	9.700.000		6.290.000	8.070.000	2.110.000			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	(1.572.500)	-25
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	28.687.500	0		12.000.000		28.687.500	0				100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	(7.171.875)	#DIV/0!
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.100.000	76.800.000	1.200.000	2.400.000		2.100.000	75.420.929	1.200.000			100,00	98,20	100,00	0,00	0,00	(525.000)	-25
7.01.01.2.13	Penataan Organisasi	136.490.000	-	0	0	-	136.490.000	0	0	0	0	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	(34.122.500)	#DIV/0!
7.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	136.490.000	0	0	0		136.490.000	0	0			100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	(34.122.500)	#DIV/0!
												#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	#DIV/0!
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	493.525.000	947.710.000	123.546.000	10.179.000	-	492.715.000	945.305.062	121.971.000	0	0	99,84	99,75	98,73	0,00	0,00	(123.381.250)	-24,958969
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	299.835.000	8.790.000	6.500.000	4.025.000	-	299.835.000	8.769.132	6.500.000	0	0	100,00	99,76	100,00	0,00	0,00	(74.958.750)	-25

7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	299.835.000	8.790.000	6.500.000	4.025.000		299.835.000	8.769.132	6.500.000			100,00	99,76	100,00	0,00	0,00	(74.958.750)	-25
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	193.690.000	171.610.000	117.046.000	6.154.000	-	192.880.000	169.392.680	115.471.000	0	0	99,58	98,71	98,65	0,00	0,00	(48.422.500)	-24,895451
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	191.350.000	167.660.000	114.860.000	0		190.540.000	165.442.680	113.285.000			99,58	98,68	98,63	#DIV/0!	0,00	(47.837.500)	#DIV/0!
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.340.000	3.950.000	2.186.000	6.154.000		2.340.000	3.950.000	2.186.000			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	(585.000)	-25
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	-	767.310.000	0	0	-	-	767.143.250	0	-	-	#DIV/0!	99,98	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	#DIV/0!
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	-	767.310.000	0	0			767.143.250	0			#DIV/0!	99,98	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	#DIV/0!
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	173.888.000	54.765.000	30.675.000	58.955.000	-	173.888.000	54.758.950	30.655.000	0	0	100,00	99,99	99,93	0,00	0,00	(43.472.000)	-25
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	32.678.000	38.350.000	25.140.000	39.695.000	-	32.678.000	38.346.495	25.120.000	0	0	100,00	99,99	99,92	0,00	0,00	(8.169.500)	-25
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25.730.000			0		25.730.000					100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	(6.432.500)	#DIV/0!
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan		31.250.000	18.890.000	31.955.000			31.246.590	18.890.000			#DIV/0!	99,99	100,00	0,00	0,00	-	#DIV/0!
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.948.000	7.100.000	6.250.000	7.740.000		6.948.000	7.099.905	6.230.000			100,00	100,00	99,68	0,00	0,00	(1.737.000)	-25
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	141.210.000	16.415.000	5.535.000	19.260.000	-	141.210.000	16.412.455	5.535.000	0	0	100,00	99,98	100,00	0,00	0,00	(35.302.500)	-25
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	10.800.000	10.580.000	4.910.000	13.095.000		10.800.000	10.578.940	4.910.000			100,00	99,99	100,00	0,00	0,00	(2.700.000)	-25
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	130.410.000	5.835.000	625.000	6.165.000		130.410.000	5.833.515	625.000			100,00	99,97	100,00	0,00	0,00	(32.602.500)	-25
												#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	#DIV/0!

7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.420.000	19.255.000	20.700.000	25.645.000	-	6.420.000	19.251.900	20.700.000	0	0	100,00	99,98	100,00	0,00	0,00	(1.605.000)	-25
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.640.000	19.255.000	20.700.000	25.645.000	-	2.640.000	19.251.900	20.700.000	0	0	100,00	99,98	100,00	0,00	0,00	(660.000)	-25
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan kepolisian negara republik Indonesia, tentara nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan		4.780.000	2.300.000	3.340.000			4.780.000	2.300.000			#DIV/0!	100,00	100,00	0,00	0,00	-	#DIV/0!
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2.640.000	14.475.000	18.400.000	22.305.000		2.640.000	14.471.900	18.400.000			100,00	99,98	100,00	0,00	0,00	(660.000)	-25
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3.780.000	-	0	0	-	3.780.000	0	0	0	0	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	(945.000)	#DIV/0!
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.780.000	0	0	0		3.780.000	0	0			100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	(945.000)	#DIV/0!
												#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	#DIV/0!
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	72.985.000	96.455.000	109.530.000	102.109.900	-	72.985.000	96.438.675	109.530.000	0	0	100,00	99,98	100,00	0,00	0,00	(18.246.250)	-25
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	72.985.000	96.455.000	109.530.000	102.109.900	-	72.985.000	96.438.675	109.530.000	0	0	100,00	99,98	100,00	0,00	0,00	(18.246.250)	-25
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	69.735.000	93.305.000	100.000.000	94.574.900		69.735.000	93.288.675	100.000.000			100,00	99,98	100,00	0,00	0,00	(17.433.750)	-25
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3.250.000	3.150.000	9.530.000	7.535.000		3.250.000	3.150.000	9.530.000			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	(812.500)	-25
												#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	#DIV/0!
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	110.920.000	32.050.000	12.635.000	86.510.000	-	110.920.000	32.045.093	12.615.000	0	0	100,00	99,98	99,84	0,00	0,00	(27.730.000)	-25

7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	110.920.000	32.050.000	12.635.000	86.510.000	-	110.920.000	32.045.093	12.615.000	0	0	100,00	99,98	99,84	0,00	0,00	(27.730.000)	-25
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.100.000	3.620.000	1.180.000	3.700.000		2.100.000	3.619.070	1.180.000			100,00	99,97	100,00	0,00	0,00	(525.000)	-25
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.950.000	1.990.000	960.000	1.790.000		3.950.000	1.990.000	960.000			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	(987.500)	-25
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.610.000	13.470.000	2.930.000	15.815.000		11.610.000	13.468.005	2.930.000			100,00	99,99	100,00	0,00	0,00	(2.902.500)	-25
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.380.000	2.130.000	1.100.000	1.850.000		1.380.000	2.129.070	1.100.000			100,00	99,96	100,00	0,00	0,00	(345.000)	-25
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.800.000	1.670.000	1.060.000	1.060.000		1.800.000	1.669.970	1.040.000			100,00	100,00	98,11	0,00	0,00	(450.000)	-25
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa				54.140.000							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	-	#DIV/0!
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	88.700.000	7.500.000	5.405.000	8.155.000		88.700.000	7.499.008	5.405.000			100,00	99,99	100,00	0,00	0,00	(22.175.000)	-25
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1.380.000	1.670.000	0	0		1.380.000	1.669.970	0	0		100,00	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	(345.000)	#DIV/0!
		3.136.968.915	2.685.174.874	1.838.152.945	1.828.777.820	-	3.110.762.917	2.665.168.523	1.827.576.816	0	0							

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Kapanewon Playen

Kapanewon Playen sebagai salah satu wilayah administratif di Kabupaten Gunungkidul memiliki komitmen kuat dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, inklusif, dan merata. Untuk mewujudkan hal tersebut, penetapan kelompok sasaran pelayanan menjadi langkah strategis dalam menjamin efektivitas dan efisiensi program-program pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah kapanewon.

Kelompok sasaran pelayanan di Kapanewon Playen mencakup berbagai lapisan masyarakat, dengan prioritas berdasarkan kebutuhan, karakteristik wilayah, serta kondisi sosial-ekonomi penduduk. Kelompok sasaran tersebut antara lain:

- a. Masyarakat Umum
Seluruh warga yang berdomisili di wilayah Kapanewon Playen merupakan penerima manfaat utama dari layanan dasar seperti administrasi kependudukan, perizinan, informasi publik, dan layanan umum lainnya.
- b. Kelompok Rentan dan Marginal
Termasuk di dalamnya adalah lansia, penyandang disabilitas, anak-anak, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah kapanewon memberikan perhatian dengan melakukan pendampingan seperti kegiatan pemberian bantuan sosial, layanan kesehatan, maupun pemberdayaan.
- c. Petani dan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
Mengingat karakteristik wilayah yang mayoritas penduduknya di sektor pertanian, pelayanan yang ditujukan kepada petani dan pelaku UMKM menjadi prioritas dalam upaya penguatan ekonomi lokal, peningkatan kapasitas produksi, serta akses terhadap pasar dan permodalan.
- d. Pemuda dan Pelajar
Sebagai generasi penerus, kelompok pemuda dan pelajar menjadi sasaran penting dalam program-program pembinaan, pelatihan keterampilan, dan peningkatan kapasitas melalui berbagai kegiatan edukatif dan partisipatif.
- e. Aparatur Kalurahan dan Lembaga Kemasyarakatan
Sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik, kelompok ini memperoleh layanan dalam bentuk pembinaan, fasilitasi, serta peningkatan kompetensi agar mampu menjalankan fungsi pelayanan secara optimal.

Penetapan kelompok sasaran ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap program dan kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Playen tepat sasaran, berdaya guna, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan pendekatan berbasis kebutuhan dan partisipatif, diharapkan pelayanan publik dapat berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel.

2.1.5 Mitra Kapanewon Playen Dalam Pemberian Pelayanan

Pemerintah Kalurahan merupakan mitra strategis dan ujung tombak Kapanewon Playen dalam penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat lokal. Sebagai struktur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, Pemerintah Kalurahan memiliki peran penting dalam menjembatani kebutuhan warga dengan program-program diselenggarakan oleh Kapanewon. Kerja sama antara Kapanewon

Playen dan Pemerintah Kalurahan dilandasi oleh semangat kolaborasi, partisipasi, serta komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kalurahan berperan sebagai pelaksana layanan langsung kepada masyarakat, penyambung aspirasi dan informasi, Pelaksana Program Pemerintah Kalurahan yang secara aktif mendukung dan melaksanakan berbagai program lintas sektor yang digagas oleh Kapanewon, seperti program kesehatan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, serta kegiatan edukatif lainnya. Pemerintah Kalurahan juga berperan aktif dalam kegiatan masyarakat melalui pembentukan dan penguatan lembaga kemasyarakatan desa, seperti LPMK, Karang Taruna, PKK, dan kelompok tani.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kapanewon Playen

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kapanewon Playen

Sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang akan dicapai saat ini dengan yang direncanakan, atau adanya kesenjangan antara yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Perumusan permasalahan pembangunan harus dapat menjelaskan permasalahan pokok yang dihadapi serta akar masalahnya. Hal ini menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah.

Kapanewon Playen merupakan salah satu dari 18 Kapanewon di Kabupaten Gunungkidul dan terletak di sebelah barat Ibukota Kabupaten dengan jarak kurang lebih 5.5 Km. Dalam rangka mempercepat keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul, Kapanewon Playen memiliki tugas pokok, yaitu melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Dalam perkembangan dinamis, tugas-tugas yang menjadi beban Kapanewon Playen dapat dilaksanakan, namun demikian masih ada permasalahan-permasalahan yang muncul dan merupakan faktor hambatan untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Langkah-langkah perumusan permasalahan dengan mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari BAB II Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD serta hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh PD. Adapun penjabaran permasalahan pokok pada aspek pelayanan umum dan ketertiban umum di Kabupaten Gunungkidul yang berkaitan dengan pelayanan PD adalah sebagai berikut:

- 1. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan** yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul disebabkan oleh **belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima** sebagai akibat dari belum optimalnya layanan kependudukan; belum optimalnya layanan pemerintahan berbasis digital (*sistem e-government*); belum optimalnya pengelolaan data secara terpadu dan terintegrasi secara spasial maupun non spasial; belum optimalnya penerapan manajemen keamanan sistem informasi daerah; belum optimalnya daya saing kelurahan; belum optimalnya pengelolaan kearsipan secara baku; belum

optimalnya manajemen kinerja ASN; belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah; belum optimalnya kinerja perencanaan daerah; belum optimalnya pelaksanaan riset dan inovasi daerah; belum optimalnya kinerja pengawasan internal daerah; belum optimalnya fungsi koordinasi terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan daerah; serta belum optimalnya dukungan terhadap tugas dan fungsi perwakilan rakyat.

- 2. Belum optimalnya stabilitas keamanan daerah**, yang disebabkan oleh **belum terciptanya kondisi wilayah yang tertib, tentram, dan aman** karena masih banyaknya pelanggaran K3 (ketertiban, keterampilan, dan keindahan); kurang optimalnya penyelenggaraan trantibum; masih adanya konflik sosial; masih adanya angka kriminalitas; masih adanya penyalahgunaan narkoba; masih adanya penduduk yang kurang merasa aman berjalan di wilayahnya; masih belum terdatanya konsumsi alkohol; belum optimalnya partisipasi peran aktif masyarakat dalam berdemokrasi; belum optimalnya pemahaman dan penerapan atas nilai-nilai Pancasila di masyarakat; serta belum optimalnya kondusifitas wilayah, termasuk pada situasi politik.

Dari uraian di atas dan setelah melakukan identifikasi dengan kondisi Kapanewon Playen dapat dirumuskan permasalahan PD sebagai berikut:

Masalah Pokok	Permasalahan PD	Keterangan
Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik	Sumber daya manusia belum memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas	Jumlah kuantitas dan kualitas SDM di Kapanewon Playen kurang memadai sehingga satu pegawai harus mengerjakan beberapa jobdesk sehingga hasilnya kurang optimal
	Kewenangan kapanewon terbatas yang dapat berdampak pada efektivitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan koordinasi antar wilayah	Kapanewon bertugas sebagai koordinator, menjembatani informasi dari pusat ke kalurahan/masyarakat
	Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan Kapanewon	Sarana prasarana pendukung belum memadai seperti tempat parkir, ruang laktasi, pojok baca, dan sarana pendukung kearsipan belum optimal

Rumusan permasalahan ini merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi ada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah bagi daerah pada suatu saat, dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Mendasar Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025–2045 memberikan arahan penting dalam perumusan isu strategis daerah. Dokumen ini menekankan pentingnya identifikasi isu strategis yang berbasis pada data dan analisis kontekstual, serta sinkronisasi dengan kebijakan nasional dan daerah. Perumusan isu strategis dilakukan melalui beberapa langkah yaitu :

1. Identifikasi Permasalahan
Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 dan laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD 2025–2045 yang berkaitan dengan pelayanan PD atau hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh PD. Permasalahan ini merupakan pernyataan kondisi yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
2. Identifikasi Isu Strategis
Mengidentifikasi isu strategis sesuai konteks (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi pemerintah/lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 ataupun hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh PD.
3. Perumusan Isu Strategis Daerah:
Merumuskan isu strategis daerah yang dapat menggunakan kertas kerja dan disimpulkan dari :
 - a. Permasalahan
 - b. Isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional)
 - c. Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan

Dari uraian di atas berikut disajikan isu strategis Kapanewon Playen

Tabel 2.5
Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon	Kewenangan Kapanewon yang terbatas Kapasitas SDM kurang memadai Prasarana dan Sarana Kapanewon kurang memadai	Masih lemahnya tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital pelayanan publik	Good Governance	Dinamika Regulasi	Reformasi Kalurahan	Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Playen

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Visi pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 adalah "Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban".

Adapun penjelasan Visi adalah sebagai berikut:

- a. **Masyarakat Adil Makmur:** Adil Makmur bermakna masyarakat yang terpenuhi kebutuhan material maupun spiritual, yang berdaya saing dan inovatif. Masyarakat Gunungkidul sebagai subyek pembangunan yang mempunyai hak ikut dalam merencanakan dan melaksanakan, serta menikmati hasil pembangunan. Kesejahteraan secara inklusif pada semua aspek kehidupan. Semua warga Gunungkidul berkesempatan dalam meningkatkan taraf kehidupan, memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, mengemukakan pendapat; melaksanakan hak-hak politik; menjaga keamanan dan ketertiban; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum, tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Kabupaten Gunungkidul yang berdaya saing dan inovatif dalam mengelola potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. **Masyarakat Lestari:** Lestari merupakan perwujudan masyarakat pada khususnya dan Kabupaten Gunungkidul pada umumnya, yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan ramah lingkungan dengan mempertahankan kekhasan bentang alam geologi pegunungan sewu, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, kelestarian sumber daya alam, dan memiliki kehandalan dalam mitigasi bencana.
- c. **Masyarakat Berkeadaban:** Berkeadaban bermakna masyarakat yang memiliki keimanan, jati diri, teladan, kehormatan, dan kemanusiaan. Keimanan menjadi landasan moral, sementara jati diri tercermin dalam sikap yang menjunjung nilai budaya dan kearifan lokal. Masyarakat berkeadaban juga merupakan masyarakat bermartabat, yang memiliki harga diri, kehormatan, keadilan, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Setiap individu mendapatkan perlakuan adil dan kesempatan yang setara untuk berkembang. Dengan nilai-nilai tersebut, masyarakat dapat hidup harmonis, maju, dan berdaya saing.

Dalam upaya pencapaian Visi Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban, maka ditetapkan **5 (lima) Misi** sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri serta perluasan akses kesehatan untuk rakyat.
2. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif.
3. Membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal.
4. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat, Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat serta

- menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban
5. Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia.

Dari visi dan misi tersebut di atas, kemudian dikaitkan dengan tugas dan fungsi kapanewon serta mendasar pada hasil identifikasi permasalahan sebagaimana pada bab selanjutnya dapat disimpulkan bahwa Kapanewon Playen mendasar pada Misi 4 Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945 menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban dengan tujuan daerah Terwujudnya tata kelola dan penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik, bersih, efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik serta sasaran daerah Terwujudnya sistem penyelenggara pemerintahan efektif, efisien dan akuntabel.

1. Tujuan Renstra Kapanewon Playen Tahun 2025-2029

Tujuan Renstra Kapanewon Playen Tahun 2025 – 2029 adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Kapanewon Playen melalui Renstra yaitu “Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas”.

2. Sasaran Renstra Kapanewon Playen Tahun 2025-2029

Sasaran Renstra Kapanewon Playen Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Kapanewon.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Perangkat Daerah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan.

Sasaran Renstra Kapanewon Playen tahun 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan
2. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial
3. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kapanewon
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di kapanewon

Sebagai alat ukur untuk menunjukkan tingkat capaian tujuan perlu dirumuskan indikator dan target kinerja tujuan. Secara rinci gambaran tujuan dan sasaran yang akan dicapai Kapanewon Playen dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Playen

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Terwujudnya Sistem Penyelenggara Pemerintahan Efektif, Efisien, dan Akuntabel	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas		Indeks Pelayanan Kapanewon (Indeks)	95,89	95,90	95,91	95,92	95,93	96,00	
		Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan	Persentase Penyusunan RPKal Benar dan Tepat Waktu (%)	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu (%)	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Persentase Kegiatan Sosial (%)	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kapanewon	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	100	100	100	
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	79,45	79,48	79,53	79,60	79,65	80,00

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kapanewon Playen dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. Adapun langkah-langkah perumusan strategi adalah

- Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
- Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih.
- Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah paling tepat.
- Menentukan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran ke dalam berbagai tabel.

Rumusan pernyataan strategi, dan arah kebijakan Kapanewon Playen dalam lima tahun mendatang dituangkan pada tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Isu Strategis	Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon		
Visi	Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban		
Misi (Keempat)	Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat, Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan	Meningkatkan Peran dan Fungsi Kapanewon	Memperkuat fungsi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM dan Meningkatkan sarana dan prasarana di Kapanewon
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kapanewon	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat di Kapanewon	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan di Kapanewon
		Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan keamanan dan bencana	Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan keamanan dan bencana

	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan kualitas layanan publik di kapanewon	Meningkatkan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan sosial di Kapanewon
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kapanewon		

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai daerah. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap untuk penyusunan dokumen Renstra. Tahap pertama adalah tahap sesuai dengan tahapan RPJPD dan RPJMD yaitu tahapan penguatan fondasi. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran prioritas pembangunan tahunan maka Kapanewon Playen melakukan pentahapan Renstra seperti yang tertuang pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Penahapan Renstra Kapanewon Playen

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas ekonomi berdasarkan potensi daerah yang lestari menuju kesejahteraan masyarakat	Percepatan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas yang lestari menuju kesejahteraan masyarakat	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas yang lestari menuju kesejahteraan masyarakat	Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas yang lestari menuju kesejahteraan masyarakat	Pemantapan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas yang lestari menuju kesejahteraan masyarakat

Arah Kebijakan Renstra PD tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD. Arah kebijakan memiliki arti penting antara lain:

- a. Pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.
- b. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional.
- c. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi PD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran.
- d. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi PD agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Tabel 3.4
Arah Kebijakan Renstra Kapanewon Playen

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan sosial di Kapanewon	
		Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan di Kapanewon	
		Memperkuat fungsi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi sarana dan prasarana pendukung	Memperkuat fungsi kelembagaan , peningkatan kapasitas SDM dan Meningkatkan sarana dan prasarana di Kapanewon	
		Mengembangkan sistem pemantauan dan respons cepat terhadap potensi gangguan keamanan	Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan keamanan dan bencana	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program Kapanewon Playen

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Rencana program prioritas beserta indikator kinerja program dan pagu per PD dalam rancangan awal RPJMD selanjutnya dijabarkan PD ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan arah kebijakan jangka menengah PD. Adapun langkah-langkah perumusan rencana program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Memperhatikan indikator program dan pagu per PD.
- b. Merumuskan target outcome program PD untuk mencapai sasaran pembangunan
- c. Melakukan perumusan target output/keluaran yang akan dihasilkan melalui kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai target outcome program PD
- d. Melakukan perumusan kegiatan
- e. Menghitung biaya kegiatan untuk mencapai target output kegiatan
- f. Menghitung biaya program untuk mencapai target outcome
- g. Memeriksa apakah total biaya program sesuai dengan pagu PD, jika melebihi pagu PD, lakukan prioritas program dan kegiatan sehingga sesuai dengan pagu PD, daftar urutan prioritas program dan kegiatan ini menjadi salah satu bahan yang akan dibahas dalam forum PD penyusunan Renstra PD
- h. Menyusun rincian target outcome program ke dalam target tahunan
- i. Berdasarkan target outcome tahunan, susun perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan program per tahun.

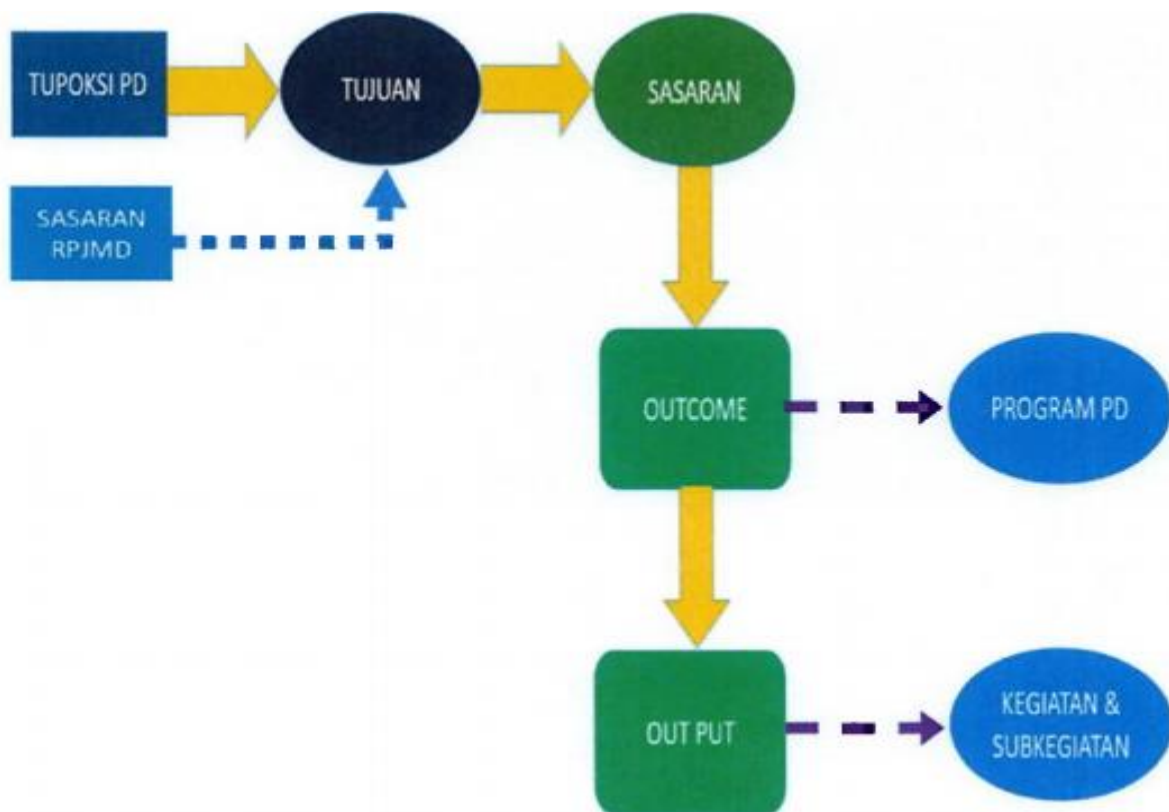
Selama periode tahun 2025-2029, Kapanewon Playen merencanakan 8 Program yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan;
6. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban;
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
8. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Tahun 2025–2029 disusun dengan pendekatan berbasis kinerja yang menggambarkan hubungan logis antara tugas dan fungsi (tupoksi), tujuan, sasaran, dan keluaran yang ingin dicapai. Kerangka ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh rencana kerja Kapanewon dapat mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan.

Sebagaimana ditunjukkan pada gambar proses perumusan terdiri dari tahapan sebagai berikut:

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kapanewon Playen



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

4.2. Kegiatan Kapanewon Playen

Selama periode 5 tahun ke depan (2025-2029), Kapanewon Playen merencanakan 18 kegiatan yaitu :

1. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya;
2. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan;
3. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
6. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7. Administrasi Umum Perangkat Daerah
8. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
9. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
10. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
11. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
12. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
13. Kegiatan Pemberdayaan Kalurahan
14. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
15. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan
16. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
17. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
18. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kapanewon Playen
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	
7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kapanewon Playen								
- Terwujudnya Sistem Penyelenggara Pemerintahan Efektif, Efisien, dan Akuntabel	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan			Indeks Pelayanan Kapanewon (Indeks)			
					Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu (%)			
					Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu (%)			
					Persentase Pemerintahan Kalurahan yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Baik (%)	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		
					Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
						Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
					Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	Persentase Desa/Kalurahan yang Difasilitasi dalam Perencanaan Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kalurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)		
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial			Persentase Kegiatan Sosial (%)		
			Terwujudnya pemanfaatan ragam budaya berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan pelestarian budaya		Persentase Pemeliharaan Dan Pengembangan Adat, Tradisi, dan Seni (%)	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
			dan kesejahteraan warga di Kapanewon Playen				
				Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	
					Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kapanewon			Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)		
			Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan		Persentase fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan		Persentase masyarakat desa dan kalurahan yang difasilitasi kegiatan pembinaan ketertiban dan keamanan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan	Laporan kegiatan pemberdayaan dan layanan sosial di kalurahan yang terfasilitasi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Meningkatnya fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan	Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	
			Meningkatnya Koordinasi		Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
			Ketentraman dan Ketertiban Umum			KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
						Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kapanewon			Indeks Kepuasan Masyarakat (%)		
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon		Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang Terlaksana (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

4.3. Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif.

Periode Renstra Kapanewon Playen Tahun 2025-2029 dari 18 Kegiatan dijabarkan dalam 50 Subkegiatan dengan kinerja, indikator, target dan pagu indikatif yang disusun untuk 5 (lima) tahun ke depan. Subkegiatan beserta pagu indikatif Kapanewon Playen tersaji dalam tabel 4.3.

Subkegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Gelar Budaya Jogja
2. Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan
3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD
7. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD
8. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
9. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
11. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
12. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
13. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
14. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
15. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
16. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
17. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
18. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
19. Fasilitasi Kunjungan Tamu
20. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
21. Pengadaan Mebel
22. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
23. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
24. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
25. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
26. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
27. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
28. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
29. Pemeliharaan Mebel
30. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
31. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
32. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
33. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
34. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada

Masyarakat di Wilayah Kecamatan

35. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
36. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
37. Pemberdayaan Masyarakat di Kalurahan
38. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
39. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
40. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
41. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
42. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
43. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
44. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
45. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
46. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
47. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
48. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
49. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
50. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Tabel 4.2

**Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Kapanewon Playen
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terwujudnya pemanfaatan ragam budaya berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan pelestarian budaya dan kesejahteraan warga di Kapanewon Playen	Persentase Pemeliharaan Dan Pengembangan Adat, Tradisi, dan Seni (%)	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kapanewon Playen	
2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				40.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				40.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan di Kapanewon Playen	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Baik (%)	100	100	40.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kapanewon Playen	
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan				40.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Ketatalaksanaan Keistimewaan															
Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	3	3	40.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000			
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				40.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000			
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	3	3	40.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000			
7.01 - KECAMATAN				2.517.205.542		2.620.662.689,78		2.649.862.274,06		2.725.504.300,6		2.736.957.585,82			
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.556.584.642		1.696.198.997,47		1.746.863.966,37		1.836.097.646,75		1.768.881.085,82			
eningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	81,44	81,59	1.556.584.642	81,77	1.696.198.997,47	81,98	1.746.863.966,37	82,23	1.836.097.646,75	82,53	1.768.881.085,82	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kapanewon Playen		
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12.652.000		14.872.000		16.572.000		18.622.000		20.492.000			
Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	12.652.000	4	14.872.000	4	16.572.000	4	18.622.000	4	20.492.000			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2				
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	2		2		2		2		3				
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2				
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1	1		1		1		1		1				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	17	17		17		17		17		17			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.370.000		4.360.000		4.860.000		5.360.000		5.860.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	2	3.370.000	2	4.360.000	2	4.860.000	2	5.360.000	3	5.860.000		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				950.000		1.090.000		1.390.000		1.690.000		1.990.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	950.000	1	1.090.000	1	1.390.000	1	1.690.000	1	1.990.000		
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				950.000		950.000		1.250.000		1.500.000		1.750.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	950.000	1	950.000	1	1.250.000	1	1.500.000	1	1.750.000		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.096.000		1.351.000		1.551.000		1.751.000		1.951.000		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	1.096.000	2	1.351.000	2	1.551.000	2	1.751.000	2	1.951.000		
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				1.136.000		1.136.000		1.136.000		1.536.000		1.756.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	1.136.000	2	1.136.000	2	1.136.000	2	1.536.000	2	1.756.000		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.645.000		3.145.000		3.345.000		3.545.000		3.745.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	17	17	2.645.000	17	3.145.000	17	3.345.000	17	3.545.000	17	3.745.000		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.505.000		2.840.000		3.040.000		3.240.000		3.440.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	2.505.000	4	2.840.000	4	3.040.000	4	3.240.000	4	3.440.000		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.283.626.042		1.292.846.042		1.302.146.042		1.312.446.042		1.322.746.042		
Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	13	13	1.283.626.042	13	1.292.846.042	13	1.302.146.042	13	1.312.446.042	13	1.322.746.042		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	205	224		224		224		224		224			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.279.021.042		1.287.021.042		1.296.021.042		1.306.021.042		1.316.021.042		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	205	224	1.279.021.042	224	1.287.021.042	224	1.296.021.042	224	1.306.021.042	224	1.316.021.042		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.155.000		1.155.000		1.355.000		1.555.000		1.755.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1.155.000	1	1.155.000	1	1.355.000	1	1.555.000	1	1.755.000		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				3.450.000		4.670.000		4.770.000		4.870.000		4.970.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	13	13	3.450.000	13	4.670.000	13	4.770.000	13	4.870.000	13	4.970.000		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0		2.000.000		2.500.000		3.000.000		3.500.000		
Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	0	28	2.000.000	28	2.500.000	28	3.000.000	28	3.500.000		
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		2.000.000		2.500.000		3.000.000		3.500.000		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	0	28	2.000.000	28	2.500.000	28	3.000.000	28	3.500.000		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.264.800		5.664.368		5.750.000		5.800.000		5.850.000		
Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6	6	1.264.800	6	5.664.368	6	5.750.000	6	5.800.000	6	5.850.000		
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1.264.800		5.664.368		5.750.000		5.800.000		5.850.000		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6	6	1.264.800	6	5.664.368	6	5.750.000	6	5.800.000	6	5.850.000		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				54.773.500		71.347.000		60.266.292,37		53.413.972,75		52.447.411,82		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	54.773.500	12	71.347.000	12	60.266.292,37	12	53.413.972,75	12	52.447.411,82		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	15	15		17		15		15		14			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	19	19		19		19		19		19			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.459.000		1.457.000		1.750.000		2.000.000		2.500.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	4	1.459.000	4	1.457.000	4	1.750.000	4	2.000.000	4	2.500.000		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				36.254.000		57.888.000		45.666.292,37		37.963.972,75		35.947.411,82		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	15	15	36.254.000	17	57.888.000	15	45.666.292,37	15	37.963.972,75	14	35.947.411,82		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2.603.000		2.602.000		2.800.000		2.950.000		3.000.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	4	2.603.000	4	2.602.000	4	2.800.000	4	2.950.000	4	3.000.000		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				2.212.500		2.500.000		2.750.000		2.850.000		3.000.000		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	2.212.500	2	2.500.000	2	2.750.000	2	2.850.000	2	3.000.000		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				1.350.000		1.360.000		1.500.000		1.750.000		2.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	1.350.000	12	1.360.000	12	1.500.000	12	1.750.000	12	2.000.000		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat				10.895.000		5.540.000		5.800.000		5.900.000		6.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	19	19	10.895.000	19	5.540.000	19	5.800.000	19	5.900.000	19	6.000.000		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				10.347.000		24.684.000		86.714.000		138.900.000		62.030.000		
Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	1	10.347.000	36	24.684.000	36	86.714.000	14	138.900.000	0	62.030.000		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		1		0			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	1		0		2		0		2			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0		1		0		1			
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				4.332.000		24.684.000		24.684.000		18.900.000		0		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	1	4.332.000	36	24.684.000	36	24.684.000	14	18.900.000	0	0		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		120.000.000		0		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	1	120.000.000	0	0		
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.015.000		0		12.030.000		0		12.030.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	1	6.015.000	0	0	2	12.030.000	0	0	2	12.030.000		
7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		50.000.000		0		50.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	1	50.000.000	0	0	1	50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				145.721.300		236.585.587,47		222.515.632		222.515.632		222.515.632		
Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	145.721.300	12	236.585.587,47	12	222.515.632	12	222.515.632	12	222.515.632		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	36		36		36		36		36			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				94.738.000		97.238.000		97.238.000		97.238.000		97.238.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	94.738.000	12	97.238.000	12	97.238.000	12	97.238.000	12	97.238.000		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				50.383.300		64.453.187,47		50.383.232		50.383.232		50.383.232		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	36	50.383.300	36	64.453.187,47	36	50.383.232	36	50.383.232	36	50.383.232		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				600.000		74.894.400		74.894.400		74.894.400		74.894.400		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	600.000	12	74.894.400	12	74.894.400	12	74.894.400	12	74.894.400		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				48.200.000		48.200.000		50.400.000		81.400.000		79.300.000		
Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	91	91	48.200.000	91	48.200.000	91	50.400.000	91	81.400.000	91	79.300.000		
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		0		0		20		30		0			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	21		21		21		21		21			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	4	6		6		7		7		7			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)													
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0		0		0		1		0			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0		0		0		0		1			
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				36.700.000				36.700.000		36.700.000		36.700.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	91	91	36.700.000	91	36.700.000	91	36.700.000	91	36.700.000	91	36.700.000		
7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0		0		1.600.000		2.400.000		0		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		0	0	0	0	20	1.600.000	30	2.400.000	0	0		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.700.000		9.700.000		10.000.000		10.200.000		10.500.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	21	9.700.000	21	9.700.000	21	10.000.000	21	10.200.000	21	10.500.000		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		0		0		30.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	30.000.000		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.800.000		1.800.000		2.100.000		2.100.000		2.100.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	6	1.800.000	6	1.800.000	7	2.100.000	7	2.100.000	7	2.100.000		
7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana				0		0		0		30.000.000		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	1	30.000.000	0	0			
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				7.526.000		7.530.000		7.800.000		8.000.000		8.500.000			
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon	Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang Terlaksana (%)	100	100	7.526.000	100	7.530.000	100	7.800.000	100	8.000.000	100	8.500.000	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kapanewon Playen		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				7.526.000		7.530.000		7.800.000		8.000.000		8.500.000			
Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	7.526.000	12	7.530.000	12	7.800.000	12	8.000.000	12	8.500.000			
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7.526.000		7.530.000		7.800.000		8.000.000		8.500.000			
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	7.526.000	12	7.530.000	12	7.800.000	12	8.000.000	12	8.500.000			
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				98.982.000		99.630.000		100.920.000		102.300.000		103.800.000			
Meningkatnya fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan	Persentase masyarakat desa dan kalurahan yang difasilitasi kegiatan pembinaan ketertiban dan keamanan (%)	100	100	3.470.000	100	4.000.000	100	4.500.000	100	4.750.000	100	5.000.000	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kapanewon Playen		
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				3.470.000		4.000.000		4.500.000		4.750.000		5.000.000			
Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan	0	26	3.470.000	0	4.000.000	26	4.500.000	0	4.750.000	26	5.000.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)														
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	0	0		26		0		26		0				
7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				3.470.000		0		4.500.000		0		5.000.000			
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	0	26	3.470.000	0	0	26	4.500.000	0	0	26	5.000.000			
7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				0		4.000.000		0		4.750.000		0			
Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	0	0	0	26	4.000.000	0	0	26	4.750.000	0	0			
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan (%)	100	100	43.053.000	100	43.060.000	100	43.500.000	100	43.700.000	100	44.000.000			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				43.053.000		43.060.000		43.500.000		43.700.000		44.000.000			
Laporan kegiatan pemberdayaan dan layanan sosial di kalurahan yang terfasilitasi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	0	9	43.053.000	9	43.060.000	9	43.500.000	9	43.700.000	9	44.000.000			
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				43.053.000		43.060.000		43.500.000		43.700.000		44.000.000			
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	0	9	43.053.000	9	43.060.000	9	43.500.000	9	43.700.000	9	44.000.000			
Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	Persentase Desa/Kalurahan yang Difasilitasi dalam Perencanaan Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (%)	100	100	52.459.000	100	52.570.000	100	52.920.000	100	53.850.000	100	54.800.000			
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				44.567.000		44.670.000		44.920.000		45.350.000		46.000.000			
Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kalurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	44.567.000	2	44.670.000	2	44.920.000	2	45.350.000	2	46.000.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	40	15		14		14		14		14				
7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				36.397.000		36.500.000		36.750.000		36.850.000		37.000.000			
Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	40	15	36.397.000	14	36.500.000	14	36.750.000	14	36.850.000	14	37.000.000			
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8.170.000		8.170.000		8.170.000		8.500.000		9.000.000			
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	8.170.000	2	8.170.000	2	8.170.000	2	8.500.000	2	9.000.000			
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				7.892.000		7.900.000		8.000.000		8.500.000		8.800.000			
Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	1	5	7.892.000	5	7.900.000	5	8.000.000	5	8.500.000	5	8.800.000			
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				7.892.000		7.900.000		8.000.000		8.500.000		8.800.000			
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	1	5	7.892.000	5	7.900.000	5	8.000.000	5	8.500.000	5	8.800.000			
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				714.331.500		656.613.692,31		656.978.307,69		602.441.653,85		712.226.500			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	714.331.500	100	656.613.692,31	100	656.978.307,69	100	602.441.653,85	100	712.226.500	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kapanewon Playen	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				714.331.500		656.613.692,31		656.978.307,69		602.441.653,85		712.226.500		
Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	15	714.331.500	14	656.613.692,31	14	656.978.307,69	13	602.441.653,85	15	712.226.500		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				714.331.500		656.613.692,31		656.978.307,69		602.441.653,85		712.226.500		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	15	714.331.500	14	656.613.692,31	14	656.978.307,69	13	602.441.653,85	15	712.226.500		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				106.726.400		107.035.000		108.000.000		110.500.000		111.750.000		
Meningkatnya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	106.726.400	100	107.035.000	100	108.000.000	100	110.500.000	100	111.750.000	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kapanewon Playen	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				106.726.400		107.035.000		108.000.000		110.500.000		111.750.000		
Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	75	75	106.726.400	75	107.035.000	75	108.000.000	75	110.500.000	75	111.750.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1	4		4		4		4		4			
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				99.191.400		99.500.000		100.000.000		102.000.000		103.000.000		
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	75	75	99.191.400	75	99.500.000	75	100.000.000	75	102.000.000	75	103.000.000		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				7.535.000		7.535.000		8.000.000		8.500.000		8.750.000		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1	4	7.535.000	4	7.535.000	4	8.000.000	4	8.500.000	4	8.750.000		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				33.055.000		53.655.000		29.300.000		66.165.000		31.800.000		
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	33.055.000	100	53.655.000	100	29.300.000	100	66.165.000	100	31.800.000	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kapanewon Playen	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi				33.055.000		53.655.000		29.300.000		66.165.000		31.800.000		
Pembinaan dan														

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengawasan Pemerintahan Desa														
Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	18	30	33.055.000	29	53.655.000	29	29.300.000	29	66.165.000	29	31.800.000		
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	28	28		28		28		28		28			
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	9	5		5		5		12		5			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	0	0		1		0		1		0			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0	5		2		0		5		0			
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				3.680.000		3.700.000		3.900.000		4.000.000		4.200.000		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	1	1	3.680.000	1	3.700.000	1	3.900.000	1	4.000.000	1	4.200.000		
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1.790.000		1.790.000		1.900.000		2.000.000		2.100.000		
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	28	28	1.790.000	28	1.790.000	28	1.900.000	28	2.000.000	28	2.100.000		
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan				15.062.000		15.500.000		16.000.000		16.500.000		17.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	18	30	15.062.000	29	15.500.000	29	16.000.000	29	16.500.000	29	17.000.000		
7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1.855.000		2.000.000		2.500.000		3.000.000		3.500.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	1	1	1.855.000	1	2.000.000	1	2.500.000	1	3.000.000	1	3.500.000		
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				8.810.000		10.000.000		0		15.000.000		0		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0	5	8.810.000	2	10.000.000	0	0	5	15.000.000	0	0		
7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				0		15.665.000		0		15.665.000		0		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	0	0	0	1	15.665.000	0	0	1	15.665.000	0	0		
7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				1.858.000		5.000.000		5.000.000		10.000.000		5.000.000		
Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	9	5	1.858.000	5	5.000.000	5	5.000.000	12	10.000.000	5	5.000.000		

4.4. Subkegiatan dalam rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Subkegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran Kapanewon Playen diturunkan dari program dan kegiatan. Subkegiatan prioritas Kapanewon Playen dalam mendukung prioritas pembangunan daerah tersaji dalam Tabel 4.3

Tabel 4.3

Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 Pemerintah Kabupaten Gunungkidulm tabel 4.3 :

NO (01)	PROGRAM PRIORITAS (02)	OUTCOME (03)	KEGIATAN / SUBKEGIATAN (04)	KETERANGAN (05)
7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kapanewon Playen				
1.	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Terwujudnya pemanfaatan ragam budaya berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan pelestarian budaya dan kesejahteraan warga di Kapanewon Playen	2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja	
2.	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Terlaksananya penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan di Kapanewon Playen	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
3.	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	

NO (01)	PROGRAM PRIORITAS (02)	OUTCOME (03)	KEGIATAN / SUBKEGIATAN (04)	KETERANGAN (05)
			7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi	
			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
			7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
			7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
4.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
5.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
		Meningkatnya fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
			7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
			7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	
6.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
7.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	
			1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
8.	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
			7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
			7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
			7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
			7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	

4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Kapanewon Playen Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

Mengacu pada Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029, Kapanewon Playen menetapkan (1) satu Tujuan PD dengan 1 (satu) indikator tujuan serta 4 (empat) Sasaran PD. Tujuan dan Sasaran menjadi Indikator Kinerja Utama Kapanewon Playen. Indikator kinerja utama Kapanewon Playen selama periode tahun 2026-2029 dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama Kapanewon Playen

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas								
1	Indeks pelayanan kapanewon	indeks	95.89	95.90	95.91	95.92	95.93	96.00	Nilai Indeks Pelayanan Kapanewon
	Sasaran :								
1	Meningkatnya Efektifitas Peran Kapanewon dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan di Kalurahan								
	Persentase penyusunan RPKal Benar dan Tepat Waktu	persen	100	100	100	100	100	100	persentase kalurahan yang menyusun RPKal benar dan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku
	Persentase penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	persen	100	100	100	100	100	100	persentase kalurahan yang menyusun APBKal benar dan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku
2	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial								
	Persentase Kegiatan Sosial	persen	100	100	100	100	100	100	persentase kegiatan sosial terlaksana
3	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kapanewon								
	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persen	100	100	100	100	100	100	persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kapanewon								
	Indeks kepuasan masyarakat	indeks	79.45	79.48	79.53	79.60	79.65	80.00	Nilai indeks kepuasan Masyarakat pada semester II yang diperoleh dengan melakukan survey kepada masyarakat pengguna layanan

4.6. Target Keberhasilan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang lebih terarah, terukur, dan akuntabel, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Playen Tahun 2025–2029 tetap mengacu pada prinsip perencanaan berbasis kinerja. Salah satu unsur penting dalam pendekatan ini adalah penggunaan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai tolok ukur pencapaian terhadap tujuan strategis organisasi.

Namun demikian, Kapanewon Playen sebagai Perangkat Daerah yang bersifat pendukung tidak memiliki IKK secara mandiri, karena substansi IKK dalam konteks perencanaan lebih erat kaitannya dengan aspek penganggaran. Oleh karena itu, pengukuran kinerja Kapanewon Playen tidak dituangkan dalam bentuk IKK tersendiri, tetapi tetap mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kapanewon Playen.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kapanewon Playen Tahun 2025-2029 merupakan pedoman rencana jangka menengah kedua yang harus dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Strategi yang dipilih baik berupa kebijakan, program, dan kegiatan dalam dokumen rencana strategis ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas ke dalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2029. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati Gunungkidul terpilih untuk pembangunan daerah lima tahun ke depan dan satu tahun masi transisi.

Sebagai salah satu perangkat daerah, Kapanewon Playen mempunyai tugas membantu dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana telah digariskan dalam RPJM Daerah 2025-2029. Rencana strategis ini disusun sebagai penelaahan terhadap materi indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

Rencana strategis ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi seluruh unit kerja dan pemangku kepentingan utamanya di Kapanewon Playen dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, sehingga dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya.

PANEWU,

AGUS SUMARYONO

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH